



IKATAN AKUNTAN INDONESIA KAPd

Sertifikat

Diberikan kepada:

VERAWATY, SE., M.SC
UNIVERSITAS BINA DARMA

Sebagai Pemakalah

Simposium Nasional Akuntansi XVII

**"PERANAN AKUNTAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
MELALUI PELAPORAN TERINTEGRASI"**

Diselenggarakan oleh:

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik
Bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

Mataram, 24-27 September 2014 (18 SKP)

Ketua IAI KAPd

Dr. Supriyadi, M.Sc., CMA., Ak., CA.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



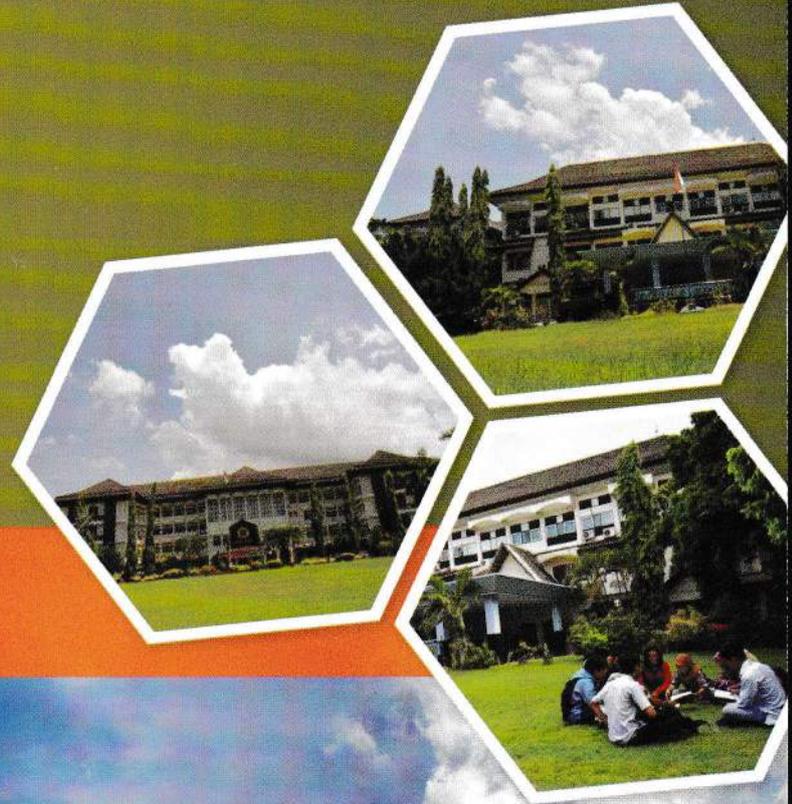
KAPd



Simposium Nasional Akuntansi

SNA XVII

UNIVERSITAS MATARAM, LOMBOK



PROSIDING

"PERANAN AKUNTAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PELAPORAN TERINTEGRASI"

24-27
SEPTEMBER
2014

Hosted by:



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MATARAM, LOMBOK

24-27
SEPTEMBER
2014



www.iaiglobal.or.id
www.snaxvii.iaikapd.or.id
762ECF98
iaf-info@iaiglobal.or.id
meyta@iaiglobal.or.id
@IAINews
fanpage: IKATAN AKUNTAN INDONESIA

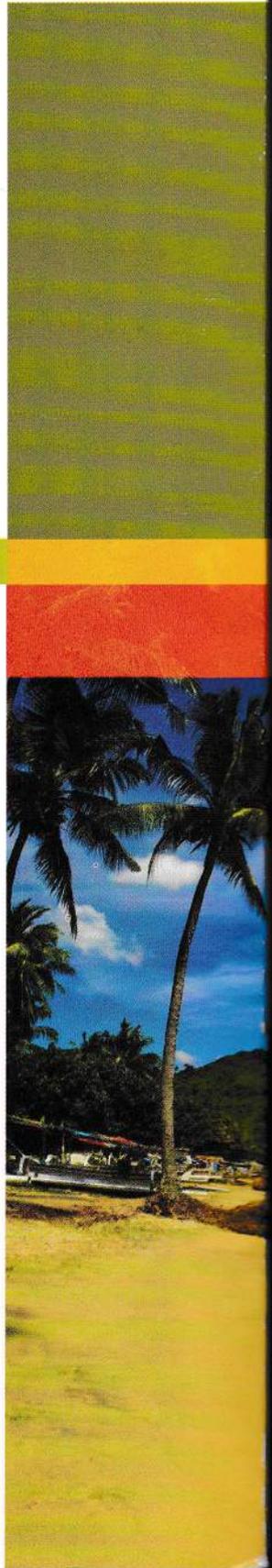


Sekretariat SNA XVII Lombok:

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1
Menteng, Jakarta 10310

Telp. [021] 31904232, 3919089 ext. 222, 333, 777
Fax. [021] 3900016, 3512076





ANALISIS KOMPARASI INDEKS *INTERNET FINANCIAL REPORTING* PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

VERAWATY

Universitas Bina Darma

Abstract

The focus research is the public sector's financial disclosures through internet or called IFR (Internet Financial Reporting). This study is aimed to compare the quality of financial reporting disclosures of provincial and city/municipal governments in Indonesia by using a disclosure index developed by Cheng et al. (2000). The study population is all local governments in Indonesia, while the study sample is divided into two. The first group is all provincial government. The second group is determined by certain criteria or purposive sampling method. The specific criteria in each province will be chosen a city/municipal government which is the broadest category of areas, most populous, and highest income per capita. It is based on Steccolini Mussari (2006) that if the sample is not a government with large city, it is considered not getting high demands on their financial disclosure statements. It is hypothesized that provincial government will disclose information in its e-government with a better format and quality than the city/municipal government. Data is collected through observation the availability of financial reports in e-government in the two groups of samples. To complete the analysis of the data collected, interview with practitioners in Indonesian local government authorities related to the IFR policy is conducted in order to provide the robustness aspect of the research results. This study uses the Mann Whitney Test to compare the content, timeliness, technology, and user support component. Based on the statistical test, all the components are not significant. That is, the result of this study indicates that there is no difference between the quality of IFR (Internet Financial Reporting) of the provincial and city/municipal governments in Indonesia. The research contribution which can be obtained from the results for the local government is a consideration in an effort to improve the implementation of e-government in the areas of accounting, which is IFR (Internet Financial Reporting) to fulfill its obligations as a provider of public information.

Keywords: *e-government, Internet Financial Reporting, accessibility index value, content, timeliness, technology, user support*

Abstrak

Penelitian berfokus pengungkapan keuangan sektor publik melalui internet atau disebut sebagai IFR (Internet Financial Reporting). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000). Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan sampel penelitian dibagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah seluruh provinsi tingkat provinsi di Indonesia. Alasannya adalah bahwa pemerintah provinsi lebih disorot oleh publik sehingga hipotesis penelitian adalah bahwa pemerintah provinsi akan mengungkapkan informasi dalam e-

government dengan format dan kualitas yang lebih baik daripada pemerintah kabupaten/kota. Kelompok kedua ditentukan oleh kriteria tertentu atau metode purposive sampling. Kriteria khusus dalam setiap provinsi akan dipilih pemerintah kabupaten/kota yang merupakan kategori paling luas daerah, paling padat penduduknya, dan memiliki pendapatan per kapita paling tinggi. Hal ini berdasarkan penelitian Mussari dan Steccolini (2006) bahwa sampel yang bukan merupakan pemerintah dengan kota yang besar dianggap tidak mendapat tuntutan tinggi tentang pengungkapan informasi laporan keuangannya. Data dikumpulkan melalui observasi dengan media internet terhadap ketersediaan e-government pada dua kelompok sampel yang akan dianalisis secara komparatif. Terakhir untuk melengkapi analisis atas data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan wawancara dengan praktisi-praktisi pemerintah daerah yang berwenang terkait dengan kebijakan IFR di daerahnya. Penelitian ini menggunakan pengujian statistik Mann Whitney Test untuk membandingkan komponen content, timeliness, technology dan user support antar kedua kelompok sampel yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pengujian dengan Mann Whitney Test, semua komponen tidak signifikan. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (Internet Financial Reporting) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al (2000). Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerapan e-government dalam bidang akuntansi, yaitu IFR (Internet Financial Reporting) untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyedia informasi publik.

Kata Kunci: e-government, Internet Financial Reporting, accessibility index value, content, timeliness, technology, user support

* Author can be contacted at: verawaty_mahyudin@yahoo.com

Pendahuluan

Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Selain itu, sekaligus dapat memperluas partisipasi publik karena masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif, baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh pemerintah, perbaikan produktifitas, dan efisiensi birokrasi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Teknologi yang dimaksud adalah internet yang merupakan teknologi informasi yang banyak menjanjikan kemudahan dan fasilitas. Melalui media ini, dapat diperoleh berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Keunggulan yang fundamental adalah tidak mengenal batas waktu dan wilayah. Selain itu, media informasi dan komunikasi ini dibandingkan dengan media lain, yaitu informasi yang didapatkan lebih murah, cepat, dan murah dengan jangkauan global.

Tren penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi juga berdampak pada sektor pemerintah. Pemerintah sangat menyadari hal ini karena itu pemerintah menempuh berbagai upaya antara lain dengan menerapkan sistem *elektronik government (e-government)* atau pemerintahan berbasis elektronik (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003). Sistem ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan pola ini, pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* ataupun pengerjaan secara manual mulai ditinggalkan.

E-government saat ini dimiliki hampir semua pemerintah daerah. Ditambah lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat (pemohon informasi publik) berhak mendapatkan akses informasi (informasi publik) dari penyelenggara pemerintahan (badan publik). Melalui *e-government*, informasi publik bisa disampaikan oleh badan publik dengan lebih ekonomis, efektif, dan efisien.

Jika dikaitkan dengan sistem informasi, tuntutan akan ketersediaan dan aksesibilitas pelaporan keuangan di sektor publik tentunya akan lebih optimal jika dilakukan dengan perencanaan informasi strategis yang merupakan kompetensi teknologi informasi yang dikembangkan dari waktu ke waktu oleh bagian *Government Chief Information Officer (GCIO)*. Semakin lengkap komponen informasi (aspek *content*), semakin tercukupi kebutuhan akan informasi publik. Semakin tepat waktu laporan dipublikasikan, semakin handal informasi yang digunakan (aspek *timeliness*).

Semakin variatif pemanfaatan teknologi, semakin aplikatif bagi *stakeholder* (aspek *technology*). Semakin optimal fitur-fitur yang menunjang penggunaan *e-government*, semakin baik sarana komunikasi kepada publik (aspek *user support*). Tentunya semua hal tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh bagian keuangan pemerintah daerah saja tanpa dukungan GCIO atau setaranya dalam pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah sebagai badan yang melakukan investasi pada teknologi informasi berupa *e-government* ini menyadari pentingnya untuk berupaya memuaskan kebutuhan akan informasi publik. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi *stakeholder* publik apakah *e-government* yang dimiliki telah dimaksimalkan pemanfaatan penggunaannya secara baik, sehingga tidak hanya pada tataran bahwa pemerintah daerah tersebut telah memiliki *e-government* saja, tetapi sampai pada optimalisasi pemanfaatannya termasuk dalam aspek akuntansinya. Fokus penelitian ini adalah pengungkapan keuangan sektor publik melalui media internet atau yang disebut sebagai IFR (*Internet Financial Reporting*).

Pembahasan penelitian akan dikupas tentang optimalisasi pelaporan akuntansi dengan berfokus pada keunggulan diseminasi informasi laporan keuangan dengan pendekatan media internet, antara lain dapat didistribusikan lebih cepat (aspek *timeliness*) dan dapat dieksploitasi untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya (aspek *disclosure*). Dengan kata lain kualitas pengungkapan pelaporan keuangan di sektor publik akan lebih optimal jika pelaporan keuangan menggunakan IFR (*Internet Financial Reporting*).

Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000). Alasan pemilihan kelompok sampel karena pemerintah provinsi tentunya lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerapan *e-government* dalam bidang akuntansi, yaitu IFR (*Internet Financial Reporting*) untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyedia informasi publik, sedangkan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan atau referensi tambahan jika ingin

mengembangkan penelitian yang berhubungan penerapan IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*.

1. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Keagenan dan Signalling dalam Pemerintahan

Menurut Zimmerman (1977), *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai prinsipal memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut prinsipal karena menggantikan peran rakyat. Namun dapat juga dipandang sebagai agen karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, prinsipal, yaitu rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen, baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai prinsipal juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam politik demokrasi (Moe, 1984). Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka. Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah pemerintahan. Fadzil dan Nyoto (2011) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan prinsipal-agen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.

Dalam konteks teori *signalling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton, 1987). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

APBD menurut UU Keuangan Negara ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Peraturan daerah ini merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah,

2006). Menurut Fadzil dan Nyoto (2011), hubungan keagenan menimbulkan asimetri informasi yang menimbulkan beberapa perilaku seperti oportunistik, *moral hazard*, dan *advesrse selection*. Perilaku oportunistik dalam proses penganggaran contohnya, (1) anggaran memasukkan program yang berorientasi publik tetapi sebenarnya mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek mereka dan (2) alokasi program ke dalam anggaran yang membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang proses pemilihan, yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dapat berpartisipasi di dalamnya.

Kedua teori ini menjadi dasar bahwa untuk meminimalkan asimetri informasi, pengungkapan akuntansi sektor publik diperlukan. Tentu dengan diseminasi melalui keunggulan internet dengan fasilitas *e-government*, pengungkapan akan lebih memadai dengan keunggulan utama, yaitu dapat didistribusikan lebih cepat (aspek *timeliness*) dan dapat dieksploitasi untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya (aspek *disclosure*).

2.2 Pengungkapan Akuntansi di Sektor Publik

Pengungkapan atau pelaporan akuntansi sektor publik dengan menggunakan media *website* pemerintah (*e-government*) merupakan konten yang biasa disebut *Internet Financial Reporting* (IFR). Menurut Oyelere et al (2003), IFR merupakan kombinasi kapasitas dan kapabilitas multimedia internet untuk mengkomunikasikan secara interaktif tentang informasi keuangan.

Secara konsep, menurut GASB No. 34 (1999) yang berisi revisi signifikan mengenai model pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, menyatakan bahwa laporan tahunan keuangan pemerintah akan berguna pada *stakeholder* publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, termasuk kualitas pengungkapannya. Penyebaran laporan ini merupakan tanggung jawab dan dikendalikan oleh pemerintah daerah. Tentunya salah satu cara yang paling efektif dari segi cara, efisien dari segi waktu, dan ekonomis dari segi biaya untuk agen pemerintah yang diotorisasi untuk tanggung jawab tersebut untuk menyebarkan informasi ini, internet dengan aplikasi IFR melalui *e-government* merupakan alternatif yang tepat.

Berdasarkan penelitian Laswad et al (2005), IFR masih merupakan *voluntary disclosure* di sektor publik. Di Indonesia juga demikian, regulasi Inpres No. 3 Tahun 2003 yang mengamanatkan implementasi penyelenggaraan pemerintah yang didukung oleh teknologi informasi dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (UU KIP) hanya mengatur apa saja yang termasuk informasi publik yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala dengan cara yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa menyebutkan apa media yang disarankan.

Suatu ukuran umum dari kualitas pengungkapan dan pelaporan dalam komunitas profesional dan akademik akuntansi pemerintahan di USA adalah program GFOA's *Certificate of Achievement* (Giroux dan McLelland, 2003). Daerah yang dianugerahi *Certificate of Achievement* (CoA) telah mengarah pada suatu komitmen untuk level pengungkapan dan pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Di Indonesia, institusi yang berwenang untuk melakukan pemeringkatan *e-government* terbaik adalah Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Depkominfo) melalui Direktorat *E-Government* (Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika). Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) merupakan acuan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah, memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah, sekaligus untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK secara nasional. Namun belum ada institusi di Indonesia yang berwenang untuk menilai kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan atau IFR dalam *website* pemerintah (*e-government*) karena Depkominfo telah secara eksplisit menyatakan bahwa tidak terdapat *formal link* antara program PeGI dengan ketersediaan konten IFR ataupun indikator kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan lainnya dalam *e-government* sebagai salah satu indikator pemeringkatan.

Karena belum ada proksi yang tepat untuk mengukur kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet (*e-government*) seperti diatas pada sektor publik di Indonesia, peneliti akan mencoba mengadopsi kualitas pengungkapan dengan menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000) yang merupakan hasil penelitian pada sektor privat. Dengan menggunakan indeks ini akan bisa dinilai optimalitas penggunaan *e-government* dalam ranah akuntansi sektor publik dan sistem informasi.

2.3 Sistem Informasi di Sektor Publik

Seperti sektor privat, sektor publik pun telah menggunakan internet. Pada semua level dan adopsinya dalam bentuk *e-government*, internet berperan signifikan dalam administrasi publik, terutama dalam pelaporan keuangan sektor publik. Melalui *e-government*, pegawai pemerintah dapat menyediakan informasi dan melakukan

pelayanan kepada *stakeholder* internal dan eksternal melalui *website*. Fokus penelitian ini, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kota di Indonesia, tentunya bukan pengecualian untuk tren ini.

Komunikasi berskala besar yang ditawarkan dalam *website* seperti *e-government* ini memberikan kesempatan untuk demokrasi digital dan akuntabilitas yang lebih transparan bagi penduduk dan *stakeholder* lainnya (Style dan Tennyson, 2007). Pertimbangan bahwa akuntabilitas secara implisit diharapkan ada dalam setiap tujuan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, *e-government* berperan penting dalam demokratisasi informasi kinerja pemerintah dengan menyediakan informasi keuangan yang paling baik dan secara potensial lebih mudah diakses oleh *stakeholder* publik.

Iklim pertumbuhan akuntabilitas memusatkan perhatian pada administrator pemerintah daerah dengan pendekatan sistem informasi. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah daerah di USA telah mengadopsi struktur pemerintahan dengan *city manager* sebagai alat untuk meningkatkan kinerja administratif dengan menunjuk *webmaster* atau yang dalam sektor privat disebut CIO atau *Chief Information Officer* (Giroux dan McLelland, 2003) dan dalam sektor pemerintah disebut dengan GCIO atau *Government Chief Information Officer* (Nugroho dalam Supangkat, 2008). Daerah-daerah yang menggunakan pendekatan administratif ini telah menunjukkan suatu kinerja keuangan yang superior (Giroux dan McLelland, 2003) dan tingkatan pengungkapan akuntansi yang lebih luas dibandingkan daerah-daerah lain dengan struktur pemerintahan yang berbeda (Robbins dan Austin, 1986 dan Giroux dan McLelland, 2003 serta Zimmerman, 1997 dan Ingram dan DeJong, 1987).

Sebagai agen dari pemerintahan daerah, GCIO mempunyai suatu dorongan untuk menunjukkan kompetensi profesional kepada konstituen daerah (DPRD). Penyediaan laporan keuangan daerah pada *e-government* memperbolehkan agen tersebut untuk menyajikan suatu dokumen yang menyediakan banyak ukuran atas kinerja mereka untuk *stakeholder* yang lebih luas daripada yang mungkin dilakukan melalui metoda pendistribusian tradisional. Dorongan untuk menunjukkan kompetensi administratif profesional yang dikombinasikan dengan ekspektasi dan kenaikan permintaan *stakeholder* untuk data pelaporan keuangan dapat terwujud salah satunya apabila daerah-daerah tersebut memiliki GCIO yang akan menyediakan data laporan keuangan di *website* mereka dengan sistem informasi yang handal. Menurut penelitian Verawaty (2012), di Indonesia, belum ada unit dalam pemerintah daerah yang berperan sebagai GCIO. Walaupun terdapat unit yang menangani masalah telematika, atau

mengelola *e-government* tetapi tidak sekaligus menjadi koordinator teknologi informasi.

Karena di Indonesia belum ada GCIO sehingga belum terdapat proksi yang tepat untuk mengukur kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet (*e-government*), penelitian ini akan membahas kualitasnya, yaitu menilai bentuk pengungkapan yang lebih baik, penyajian konten dalam bentuk pdf atau html, pemanfaatan teknologi seperti penggunaan media teknologi multimedia seperti *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*), fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi "*Intelligent Agent*" atau XBRL) ataupun *user support* seperti media pencarian dan navigasi/*search and navigation tools* (seperti FAQ, *links to homepage*, *site map*, *site search*).

2.4 Penelitian-Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Literatur-literatur IFR yang ada mengindikasikan bahwa bahwa sama seperti sektor privat, sektor publik juga menggunakan internet sebagai mekanisme untuk menyebarkan laporan dan pengungkapan yang disediakan bagi *stakeholder* publik. Hal ini mendukung pernyataan Wagenhofer (2003) bahwa IFR tidak mungkin melepaskan diri dari pengungkapan akuntansi sektor publik.

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian. Terdapat beberapa penelitian dari luar negeri yang membahas mengenai ketersediaan laporan keuangan melalui media internet atau IFR pada sektor publik, yaitu Groff dan Pittman (2004) meneliti mengenai praktek IFR pada 100 pemerintah daerah terbesar di USA. Laswad et al (2005) menguji IFR secara sukarela pada pemerintah daerah di New Zealand. Kemudian Styles dan Tennyson (2007) meneliti *accessibility* pelaporan keuangan semua pemerintah daerah USA di internet. Adapun penelitian dari Indonesia yaitu, Verawaty (2010) meneliti ketersediaan IFR pada pemerintah daerah di Sumatera Selatan, penelitian Verawaty (2012) meneliti ketersediaan IFR pada tingkat pemerintah provinsi di Indonesia, Verawaty dan Merina (2011) meneliti aksesibilitas IFR pemerintah provinsi di Indonesia dengan mengaitkannya dengan penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan Verawaty (2013) meneliti determinan aksesibilitas IFR pemerintah daerah di Indonesia dengan sampel pemerintah provinsi.

Penelitian terakhir, Verawaty (2013) hanya mengungkapkan mengenai aksesibilitas *content* (isi), yaitu berapa langkah yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan dalam *e-government* dengan menghubungkannya dengan variabel

size, *income percapita*, dan *debt*. Adapun mengenai aspek *timeliness* (ketepatanwaktuan), *technology* (pemanfaatan teknologi), dan *user support* (dukungan bagi pengguna) tidak dibahas. Penelitian ini akan lebih jauh membahas kualitas pengungkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan indeks Cheng et al. (2000), yaitu menilai empat komponen sekaligus, yaitu *content* (isi), *timeliness* (ketepatanwaktuan), *technology* (pemanfaatan teknologi), dan *user support* (dukungan bagi pengguna).

Isu penelitian mengenai kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR pada sektor pemerintah belum pernah diangkat di Indonesia. Akan tetapi penelitian yang sama pada sektor privat sudah dilakukan, yaitu Almilia (2009) dan Mannan (2009). Hal ini terjadi karena penggunaan teknologi informasi pada sektor pemerintah yang ditandai dengan penggunaan *e-government* baru marak mulai satu dekade terakhir ini saja.

Pemerintah provinsi dianggap memiliki kekayaan yang lebih besar daripada pemerintah kabupaten/kota. Penelitian yang dilakukan oleh Ingram (1984) dan Laswad et.al. (2005) memiliki kesimpulan yang sama yaitu semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian lain, yaitu Verawaty (2010) dan Verawaty dan Merina (2011) menemukan bahwa jumlah penduduk berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Selain memiliki kekayaan yang lebih besar, pemerintah provinsi jelas memiliki jumlah penduduk lebih besar sehingga diasumsikan akan memberikan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) yang lebih baik dibanding pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Mussari dan Steccolini (2006) bahwa yang bukan merupakan pemerintah dengan kota-kota yang besar dianggap tidak mendapat tuntutan tinggi tentang pengungkapan informasi laporan keuangannya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) antara dengan dua kelompok sampel, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000), yaitu dengan membandingkan empat komponen antara lain *content*, *timeliness*, *technology* dan *user support*. Alasan pemilihan kelompok sampel karena pemerintah provinsi tentunya lebih

disorot oleh masyarakat sehingga *hipotesis penelitian* adalah pemerintah provinsi mengungkapkan informasi keuangan yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota.

2. Metode Penelitian

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada *hypothetico-deductive method*. Menurut Sekaran (2006), penelitian dengan menggunakan metoda ini melibatkan tujuh tahap, yaitu:

1. *Observation* (Observasi)
2. *Preliminary Information Gathering* (Pengumpulan Data Awal)
3. *Theory Formulation* (Perumusan Teori)
4. *Hypothesis* (Perumusan Hipotesis)
5. *Further Scientific Data Collection* (Pengumpulan Data Saintifik Selanjutnya)
6. *Data Analysis* (Analisis Data)
7. *Deduction* (Deduksi)

3.2 Variabel Penelitian

Adapun berdasarkan Cheng et al. (2000), variabel-variabel yang digunakan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) dalam hipotesis ini adalah *content* (isi), *timeliness* (ketepatanwaktuan), *technology* (pemanfaatan teknologi), dan *user support* (dukungan bagi pengguna). Berikut penjelasan mengenai masing-masing variabel penelitian:

1. **Content**, yaitu meliputi komponen informasi keuangan seperti laporan neraca, rugi laba, arus kas, perubahan posisi keuangan serta laporan keberlanjutan seperti *footnotes*, *partial sets of financial statements* dan/atau *financial highlights* yang meliputi *summary financial statements* dan inti dari *financial statements* tersebut yang dipublikasikan melalui *e-government*. Informasi keuangan yang diungkapkan dalam bentuk html memiliki skor yang tinggi dibandingkan dalam format pdf, karena informasi dalam bentuk html lebih memudahkan pengguna informasi untuk mengakses informasi keuangan tersebut menjadi lebih cepat.

2. **Timeliness** atau ketepatanwaktuan, yaitu informasi yang siap digunakan para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan keputusan. Ketika *e-government* dapat menyajikan informasi yang tepat waktu, maka semakin tinggi indeksinya.

3. **Technology** atau pemanfaatan teknologi, yaitu komponen ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang ada dalam *e-government* yang tidak dapat disediakan oleh media laporan cetak serta penggunaan media teknologi multimedia, *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*), fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi *Intelligent Agent* atau XBRL). Semakin banyak fitur, semakin tinggi indeksnya.

4. **User Support** atau dukungan bagi pengguna, yaitu komponen ini terkait dengan fasilitas yang mempermudah pengguna untuk menemukan laporan keuangan di dalam *e-government*. Indeks *e-government* daerah semakin tinggi jika pemerintah daerah mengimplementasikan secara optimal semua sarana dalam *website* seperti media pencarian dan navigasi/*search and navigation tools* (seperti FAQ, *links to homepage*, *site map*, *site search*).

Adapun untuk menilai keempat komponen tersebut, berikut Tabel 1 yang merupakan Indeks Aksesibilitas (Style dan Tennyson, 2007):

A	<i>Financial Highlights</i>	menyajikan <i>summary financial statements</i> dalam bentuk tabel ringkas atau uraian ringkas dan mudah diakses
B	<i>Financial Statement</i>	menyajikan komponen Laporan Keuangan yang lengkap dan komprehensif
C	<i>Html Format</i>	bentuk html memiliki skor yang tinggi dibandingkan dalam format pdf karena informasi lebih mudah dan cepat diakses
D	<i>Data for Prior Years</i>	IFR juga menyajikan laporan tahun sebelumnya sebagai pembandingan
E	<i>Up Date</i>	IFR untuk tahun berjalan (misal disajikan persemester biar selalu update dan tepat waktu)
F	<i>Analysis Tools</i>	menyediakan <i>analysis tools</i> (contohnya, <i>Excel's Pivot Table</i>)
G	Fitur Lanjutan	menyediakan fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi <i>Intelligent Agent</i> atau XBRL)
H	<i>Site Search</i>	<i>search engine</i> di dalam situsnya bisa digunakan untuk mencari LK
I	<i>Link Page</i>	menyediakan link ke IFR di dalam situsnya
J	<i>FAQ or Contact</i>	menyediakan fasilitas tanya jawab atau email/phone pengelola

Keterangan:

- Total indeks adalah 10 poin. *Content* memiliki maksimal 3 poin (A-C), *timeliness* adalah maksimal 2 poin (D-E), *technology* 2 poin (F-G), dan *user support* adalah 3 poin (H-J).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Populasi penelitian adalah semua pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan sampel penelitian dibagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah semua pemerintah provinsi tingkat provinsi di Indonesia. Alasannya adalah pemerintah provinsi tentunya

lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Adapun kelompok kedua ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau *purposive sampling method*. Kriteria khusus tersebut adalah di setiap provinsi akan dipilih satu pemerintah kabupaten/kota yang merupakan daerah kategori paling luas, paling banyak penduduk, dan paling tinggi pendapatan per kapitanya. Hal ini berdasarkan penelitian Mussari dan Steccolini (2006) bahwa sampel yang bukan merupakan pemerintah dengan kota-kota yang besar dianggap tidak mendapat tuntutan tinggi tentang pengungkapan informasi laporan keuangannya. Selain itu kriteria umum untuk setiap kelompok sampel adalah memiliki *e-government* sampai dengan September 2013 dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*).

Data dikumpulkan melalui observasi dengan media internet terhadap ketersediaan *e-government* pada dua kelompok sampel yang akan dianalisis secara komparatif. Terakhir untuk melengkapi analisis atas data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan wawancara dengan praktisi-praktisi pemerintah daerah yang berwenang terkait dengan kebijakan IFR di daerahnya. Hal ini diperlukan karena penelitian ini tentunya akan bersifat eksploratif karena belum pernah ada penelitian yang sama dilakukan di Indonesia sebelumnya sehingga dukungan hasil wawancara terhadap beberapa praktisi pemerintah daerah akan memberikan *robustness aspect* terhadap hasil penelitian. Selain itu, tentunya data sekunder lainnya adalah berbagai sumber yang menjadi tinjauan pustaka dalam membangun hipotesis dan sekaligus mengujinya, antara lain buku-buku teks, artikel-artikel ilmiah ataupun populer, koran, serta internet.

3.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengujian statistik *Mann Whitney Test* untuk membandingkan komponen *content*, *timeliness*, *technology* dan *user support* antar kedua kelompok sampel yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pengujian ini digunakan untuk menguji signifikansi - hipotesis komparatif dua sampel independent yang datanya berbentuk ordinal. Uji ini mirip dengan uji anova pada data parametrik hanya saja tidak dipenuhi anggapan kenormalan (tanpa uji asumsi klasik) dari data. Analisis yang digunakan berdasarkan ranking data, bukan data itu sendiri.

3. Hasil Yang Dicapai

Hasil survei yang telah dilakukan pada periode penelitian terkait dengan *website* yang dimiliki oleh sampel penelitian, yaitu 66 pemerintah daerah di Indonesia, 33 pemerintah provinsi dan 33 pemerintah kota terpilih berdasarkan *purposive sampling*, menunjukkan bahwa 90,91% *e-government* pemerintah provinsi dalam status *online* atau hanya 30 *e-government*. Adapun hanya 78,79% *e-government* pemerintah kota dalam status *online*, yaitu 26 *e-government*, sisanya 9,09% *e-government* yang dimiliki dalam status *error* (kemungkinan dalam status *under maintenance*), yaitu 3 *e-government* dan 12,12% pemerintah kota bahkan belum memiliki *e-government*, yaitu 4 pemerintah kota.

Hasil survei juga menunjukkan adanya disparitas praktek pengungkapan informasi keuangan melalui *e-government* dan masih sedikitnya pemerintah daerah memanfaatkan penggunaan teknologi internet. Dari total 90,91% *e-government* pemerintah provinsi, hanya 56,67% yang melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR). Adapun dari total hanya 78,79% *e-government* pemerintah kota, hanya 42,31% yang melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR). Kualitas pengungkapan dilakukan oleh kedua kelompok sampel sangat bervariasi.

Berdasarkan Tabel 2 yang merupakan hasil survei (observasi) terhadap *e-government* pemerintah provinsi, komponen paling tinggi adalah *user support*. Dalam komponen ini dinilai apakah di dalam *e-government* memiliki fitur *Site Search* (*search engine* di dalam situsnya bisa digunakan untuk mencari laporan keuangan), *Link Page* (menyediakan link ke IFR di dalam situsnya), dan *FAQ or Contact* (menyediakan fasilitas tanya jawab atau email/phone pengelola). Fitur terakhir paling banyak disediakan di dalam *e-government*.

Berdasarkan poin aksesibilitas, komponen kedua dan ketiga adalah *timeliness* dan *technology*. Namun yang paling menarik adalah tidak tersedianya fitur *technology* di semua *e-government* pemerintah provinsi. Penilaian untuk komponen ini adalah berdasarkan *Analysis Tools*, yaitu menyediakan *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*) dan Fitur Lanjutan (menyediakan fitur-fitur lanjutan, yaitu seperti implementasi *Intelligent Agent* atau XBRL).

Jika dilihat per provinsi, DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling unggul. Dari 10 poin, DKI Jakarta meraih 7 poin. Kemudian disusul oleh provinsi DIY, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah dengan nilai masing-masing 5 poin. Adapun provinsi mana yang paling rendah nilai poinnya, yaitu 1 poin, ternyata sangat dominan, yaitu 40% dari total keseluruhan sampel penelitian.

Tabel 2 Hasil Survei (Observasi) terhadap e-Government Pemerintah Provinsi

NO	NAMA PROVINSI	Status	POIN AKSEBILITAS										JLH
			Content			Time		Techno		User Support			
Status per 14 Sept 2013			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Bali	online										1	1 non ifr
2	Banten	online										1	1 non ifr
3	Bengkulu	offline											0 site error
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	online	1	1		1					1	1	5 ifr
5	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	online	1	1	1	1				1	1	1	7 ifr
6	Gorontalo	online		1	1		1				1	1	5 ifr
7	Jambi	online		1		1					1	1	4 ifr
8	Jawa Barat	online		1		1					1	1	4 ifr
9	Jawa Tengah	online										1	1 file ifr tdk bisa diakses
10	Jawa Timur	online										1	1 file ifr tdk bisa diakses
11	Kalimantan Barat	online										1	1 file ifr tdk bisa diakses
12	Kalimantan Selatan	online										1	1 file ifr tdk bisa diakses
13	Kalimantan Tengah	online		1		1				1	1	1	5 ifr
14	Kalimantan Timur	online										1	1 non ifr
15	Kepulauan Bangka Belitung	online		1		1					1	1	4 ifr
16	Kepulauan Riau	online	1		1						1	1	4 file ifr tdk bisa diakses
17	Lampung	online									1	1	2 file ifr tdk bisa diakses
18	Maluku	online										1	1 non ifr
19	Maluku Utara	offline											0 site error
20	Nanggroe Aceh Darussalam	online										1	1 non ifr
21	Nusa Tenggara Barat	online		1	1	1						1	4 ifr
22	Nusa Tenggara Timur	online									1	1	2 non ifr
23	Papua	online										1	1 non ifr
24	Papua Barat	online											0 non ifr
25	Riau	online						1			1	1	3 ifr terbatas
26	Sulawesi Barat	online									1	1	2 file ifr tdk bisa diakses
27	Sulawesi Selatan	online										1	1 non ifr
28	Sulawesi Tengah	online									1	1	2 file ifr tdk bisa diakses
29	Sulawesi Tenggara	online										1	1 non ifr
30	Sulawesi Utara	online									1	1	2 non ifr
31	Sumatera Barat	online									1	1	2 non ifr
32	Sumatera Selatan	offline											0 site error
33	Sumatera Utara	online										1	1 non ifr

Tabel 3 Hasil Survei (Observasi) terhadap *e-Government* Pemerintah Kota

NO	NAMA KOTA	Status	POIN AKSEBILITAS										JLH	
			Content			Time		Techno		User Support				
Status per 15 Sept 2013			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	Denpasar	online										1	1	non ifr
2	Serang	online										1	1	non ifr
3	Bengkulu	online										1	1	non ifr
4	Yogyakarta	online		1		1					1	1	4	ifr
5	Jakarta	online	1	1	1	1				1	1	1	7	ifr
6	Gorontalo	online									1	1	2	non ifr
7	Jambi	online										1	1	non ifr
8	Bandung	online		1		1					1	1	4	ifr
9	Semarang	online									1	1	2	file ifr tdk bisa diakses
10	Surabaya	online		1		1				1	1	1	5	ifr
11	Pontianak	online									1	1	2	non ifr
12	Banjarmasin	online										1	1	file ifr tdk bisa diakses
13	Palangkaraya	offline											0	situs error
14	Samarinda	online										1	1	non ifr
15	Pangkal Pinang	offline											0	Belum ada website
16	Tanjung Pinang	offline											0	Belum ada website
17	Bandar Lampung	online										1	1	non ifr
18	Ambon	online		1		1	1				1	1	5	ifr
19	Sofifi	offline											0	Belum ada website
20	Banda Aceh	online		1	1	1					1	1	5	ifr
21	Mataram	online									1	1	2	file ifr tdk bisa diakses
22	Kupang	online										1	1	non ifr
23	Jayapura	online										1	1	non ifr
24	Manokwari	online											0	Belum ada website
25	Pekanbaru	offline											0	situs error
26	Mamuju	online										1	1	non ifr
27	Makasar	online											0	situs error
28	Palu	online									1	1	2	file ifr tdk bisa diakses
29	Kendari	online		1		1					1	1	4	ifr
30	Manado	online										1	1	non ifr
31	Padang	online									1	1	2	non ifr
32	Palembang	online										1	1	non ifr
33	Medan	online										1	1	non ifr

Berdasarkan Tabel 3 hanya 78,79% *e-government* pemerintah kota dalam status *online*, sisanya 9,09% *e-government* yang dimiliki dalam status error (kemungkinan

dalam status *under maintenance*), dan 12,12% pemerintah kota bahkan belum memiliki *e-government*. Jadi hanya ada 26 pemerintah kota yang sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika dikaitkan kualitas pengungkapan berdasarkan penelitian Cheng et al (2000), hasilnya sama seperti pada kelompok sampel pemerintah provinsi, yaitu komponen yang paling tinggi adalah *user support*. Komponen ini menilai apakah di dalam *e-government* memiliki fitur *Site Search* (*search engine* di dalam situsnya bisa digunakan untuk mencari laporan keuangan), *Link Page* (menyediakan link ke IFR di dalam situsnya), dan *FAQ or Contact* (menyediakan fasilitas tanya jawab atau email/phone pengelola). Fitur terakhir juga yang paling banyak disediakan di dalam *e-government*.

Berdasarkan poin aksesibilitas, komponen kedua dan ketiga adalah *timeliness* dan *technology*. Namun yang paling menarik adalah juga tidak tersediakan fitur *technology* di semua *e-government* pemerintah kota. Penilaian untuk komponen ini adalah berdasarkan *Analysis Tools*, yaitu menyediakan *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*) dan Fitur Lanjutan (menyediakan fitur-fitur lanjutan, yaitu seperti implementasi *Intelligent Agent* atau XBRL. Adapun untuk komponen *timeliness*, hanya tujuh pemerintah kota yang mengoptimalkannya, yaitu Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Ambon, Banda Aceh, dan Kendari. Hal ini berarti 21,2 % dari kelompok sampel pemerintah kota.

Jika dilihat per kota, Jakarta merupakan kota yang paling unggul. Dari 10 poin, DKI Jakarta meraih 7 poin. Kemudian disusul oleh kota Surabaya dan Ambon dengan nilai masing-masing 5 poin. Adapun provinsi mana yang paling rendah nilai poinnya, yaitu 1 poin, ternyata sangat dominan, yaitu 39,4 % dari total keseluruhan kelompok sampel penelitian ini.

Tabel 4 Statistik Deskriptif Kualitas *Internet Financial Reporting* (IFR)

Variabel	Kelompok Sampel	N	Mean
<i>CONTENT</i>	Pemerintah Provinsi	30*	0.07
	Pemerintah Kota	26**	0.05
<i>TIMELINES</i>	Pemerintah Provinsi	30	0.03
	Pemerintah Kota	26	0.03
<i>TECHNOLOGY</i>	Pemerintah Provinsi	30	0
	Pemerintah Kota	26	0
<i>USER SUPPORT</i>	Pemerintah Provinsi	30	0.10
	Pemerintah Kota	26	0.11
TOTAL	Pemerintah Provinsi	30	0.20
	Pemerintah Kota	26	0.19

Keterangan:

30* : Dari 33 *e-government* pemerintah provinsi, hanya ada 30 dalam status online.

28** : Dari 33 *e-government* pemerintah kota terpilih, hanya ada 26 dalam status online.

Berdasarkan Tabel 4 secara deskriptif, *e-government* yang dimiliki pemerintah provinsi mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota walaupun perbedaan di antara keduanya tidak begitu jauh, yaitu dengan selisih mean 0,1 saja.

Berikutnya merupakan pengujian secara statistik. Karena penelitian ini membandingkan dua kelompok sampel dari populasi yang sama, sehingga jumlahnya pun harus sama. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kriteria umum untuk setiap kelompok sampel adalah memiliki *e-government* sampai dengan September 2013 dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*). Jadi yang lolos untuk uji tes, untuk pemerintah provinsi kecuali Bengkulu, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan, sedangkan pemerintah kota kecuali Palangkaraya, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Sofifi, Manokwari, Pekanbaru, dan Makasar.

Berikut hasil pengujian statistik *Mann Whitney Test* untuk membandingkan komponen *content*, *timeliness*, *technology* dan *user support* antar kedua kelompok sampel yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kota:

Tabel 5 Pengujian *Mann Whitney Test* untuk Komponen *Content*

Ranks				
	KELOMPOK_PEMERINTAH	N	Mean Rank	Sum of Ranks
CONTENT	0	30	29.13	874.00
	1	26	27.77	722.00
	Total	56		

Test Statistics^a

	CONTEN T
Mann-Whitney U	371.000
Wilcoxon W	722.000
Z	-.393
Asymp. Sig. (2-tailed)	.694

a. Grouping Variable:
KELOMPOK_PEMERINTAH

Dari output **Rank**, dapat kita lihat bahwa nilai mean untuk pemerintah provinsi lebih besar daripada nilai pemerintah kota (**29,13 > 27,77**). Dari pengujian **Mann Whitney Test**, yaitu output “**Test Statistic^a**”, nilai statistik uji Z yang kecil yaitu **-0,393** dan nilai **sig.2-tailed adalah 0,694 > 0,05**. Hal ini berarti hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian tidak ada perbedaan pengungkapan informasi pada *e-government* yang dimilikinya antara pemerintah provinsi dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota untuk komponen *content*.

Tabel 6 Pengujian Mann Whitney Test untuk Komponen Timeliness

Ranks

KELOMPOK_ K_ PEMERINTAH	N	Mean Rank	Sum of Ranks
TIMELINES 0	30	28.75	862.50
S 1	26	28.21	733.50
Total	56		

Test Statistics^a

	TIMELINES S
Mann-Whitney U	382.500
Wilcoxon W	733.500
Z	-.157
Asymp. Sig. (2-tailed)	.875

a. Grouping Variable:
KELOMPOK_PEMERINTAH

Dari output **Rank**, dapat kita lihat bahwa nilai mean untuk pemerintah provinsi sedikit lebih besar daripada nilai pemerintah kota (**28,75 > 28,21**). Dari pengujian **Mann Whitney Test**, yaitu output “**Test Statistic^a**”, nilai statistik uji Z yang kecil yaitu **-0,157** dan nilai **sig.2-tailed** adalah **0,875 > 0,05**. Hal ini berarti hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian tidak ada perbedaan pengungkapan informasi pada *e-government* yang dimilikinya antara pemerintah provinsi dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota untuk komponen *timeliness*.

Tabel 7 Pengujian Mann Whitney Test untuk Komponen User Support

Ranks				
	KELOMPOK PEMERINTAH	N	Mean Rank	Sum of Ranks
USER_SUPPORT	0	30	28.22	846.50
	1	26	28.83	749.50
	Total	56		

Test Statistics ^a	
	USER_SUPPORT
Mann-Whitney U	381.500
Wilcoxon W	846.500
Z	-.155
Asymp. Sig. (2-tailed)	.877

a. Grouping Variable:
KELOMPOK_PEMERINTAH

Dari output **Rank**, dapat kita lihat bahwa nilai mean untuk pemerintah kota sedikit lebih besar daripada nilai pemerintah provinsi (**28,83 > 28,22**). Dari pengujian **Mann Whitney Test**, yaitu output “**Test Statistic^a**”, nilai statistik uji Z yang kecil yaitu **-0,155** dan nilai **sig.2-tailed** adalah **0,877 > 0,05**. Hal ini berarti hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian tidak ada perbedaan pengungkapan informasi pada *e-government* yang dimilikinya antara pemerintah provinsi dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota untuk komponen *user support*.

Adapun pengujian untuk komponen *technology* tidak bisa dilakukan karena, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota sama sekali tidak mengoptimalkannya. Jadi nilainya nol atau tingkat signifikansinya adalah 1.

Berikut tabel pengujian simultan untuk keempat komponen:

Tabel 8 Pengujian *Mann Whitney Test* untuk Empat Komponen Cheng et al (2000)

		Ranks		
	KELOMPOK_ PEMERINTAH	N	Mean Rank	Sum of Ranks
CONTENT	0	30	29.13	874.00
	1	26	27.77	722.00
	Total	56		
TIMELINESS	0	30	28.75	862.50
	1	26	28.21	733.50
	Total	56		
TECHNOLOGY	0	30	28.50	855.00
	1	26	28.50	741.00
	Total	56		
USER_SUPPORT	0	30	28.22	846.50
	1	26	28.83	749.50
	Total	56		

Test Statistics^a

	CONTENT	TIMELINES	TECHNOLOGY	USER_SUPPORT
Mann-Whitney U	371.000	382.500	390.000	381.500
Wilcoxon W	722.000	733.500	741.000	846.500
Z	-.393	-.157	.000	-.155
Asymp. Sig. (2-tailed)	.694	.875	1.000	.877

a. Grouping Variable: KELOMPOK_PEMERINTAH

Berdasarkan Tabel 8, semua komponen tidak signifikan. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000).

Dukungan atas fenomena diatas belum bisa dijelaskan secara empiris karena penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Namun secara normatif, berdasarkan

sisi regulasi, *e-government* telah diperkenalkan itu dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang kemudian disusul oleh regulasi-regulasi berikutnya yang relevan tentang penggunaan teknologi informasi di pemerintahan. Namun, tentang bagaimana standardisasi *content*-nya belum bersifat *mandatory*.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa praktisi pemerintah, komponen *timeliness*, yaitu tentang apakah *e-government* juga menyajikan IFR untuk laporan tahun sebelumnya sebagai pembanding dan IFR untuk tahun berjalan (misal disajikan per semester biar selalu update dan tepat waktu), dianggap tidak perlu dilakukan karena ada badan publik lain, yaitu yang lebih berkompeten melakukannya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan yang melakukan penilaian atas laporan keuangan pemerintah. *Website* BPK dianggap yang paling tepat melakukan transparansi atas LK pemerintah. Walaupun dalam ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/DJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran yang salah satu isinya adalah menyiapkan menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam *website* resmi pemerintah provinsi. Hasil observasi melalui penelitian ini mengindikasikan pemerintah provinsi belum bisa menerapkannya.

Adapun jika menyangkut *technology* dan *user support*, menurut Verawaty (2012), *e-government* merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/industri, belum banyak di sektor publik. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari *e-government*, terutama tentang *Analysis Tools* dan fitur-fitur lanjutan. Menurut Sosiawan (2008), untuk mengatasi hambatan langkanya SDM yang handal, maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Secara pragmatis, hendaknya pelatihan tersebut bersifat *inhouse* di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan *literacy* yang menyeluruh di kalangan pegawai pemerintah daerah. *Inhouse training* tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada. Sementara di tingkat pusat perlu diselenggarakan secara sentralisasi (oleh Depkominfo melalui Diklat terpadu) dan secara desentralisasi dengan membuat pusat-pusat diklat di lembaga pendidikan milik Depdagri atau lembaga pendidikan milik swasta yang bekerjasama dengan Depkominfo ataupun perguruan tinggi. Selain itu diklat ini dapat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemerintah

daerah yang lebih tahu kebutuhannya sendiri berkaitan dengan implementasi *e-government*.

Peningkatan SDM pegawai untuk implementasi *e-government* perlu penanganan yang serius dan dilakukan bersama oleh pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak swasta. Yang paling penting dan utama untuk disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah perlu diubah pandangan tentang keberhasilan pelaksanaan *e-government* bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya. Pada sisi manajerial perlu dibuat suatu model pengelolaan *e-government*, baik untuk tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada struktur organisasi yang ada di departemen, kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen perlu dipertegas bagian dari organisasi yang menangani *e-government* disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi yang telah ada agar tidak terjadi kerancuan di dalam pengelolaan dan implementasi *e-government* di pemerintahan daerah.

Implikasi penelitian ini adalah pentingnya suatu lembaga yang mengatur dan menilai kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui *e-government*. Tentu saja ini juga akan berimplikasi pada perlunya dilakukan regulasi terhadap pengungkapan optimalisasi pemanfaatan *e-government*, baik bagi perusahaan provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

4. Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berusaha membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000) berdasarkan komponen *content*, *timeliness*, *technology* dan *user support*. Alasan pemilihan kelompok sampel karena pemerintah provinsi tentunya lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan hasil survei, yaitu 78,79% *e-government* pemerintah kota dalam status *online*, sisanya 9,09% *e-government* yang dimiliki dalam status *error* (kemungkinan dalam status *under maintenance*) dan 12,12% pemerintah kota bahkan belum memiliki *e-government*. Hasil survei juga menunjukkan adanya disparitas praktek pengungkapan

informasi keuangan melalui *e-government* dan masih sedikitnya pemerintah daerah memanfaatkan penggunaan teknologi internet. Dari total 90,91% *e-government* pemerintah provinsi, hanya 56,67% yang melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR). Adapun dari total hanya 78,79% *e-government* pemerintah kota, hanya 42,31% yang melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR). Kualitas pengungkapan dilakukan oleh kedua kelompok sampel sangat bervariasi.

Berdasarkan hasil pengujian dengan *Mann Whitney Test*, semua komponen tidak signifikan. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al (2000).

Adapun berdasarkan hasil wawancara, permasalahan di lapangan tentang kurangnya optimalisasi terhadap penggunaan *e-government* untuk bidang akuntansi sektor publik (keuangan daerah) antara lain adalah mengenai regulasi-regulasi yang relevan tentang penggunaan teknologi informasi di pemerintahan, yaitu tentang bagaimana standardisasi *content* yang menyangkut akuntansi keuangan daerah yang masih belum bersifat *mandatory*. Pelimpahan kewajiban diseminasi kinerja keuangan pemerintah daerah untuk komponen *timeliness* adalah kepada pihak BPK. Hal ini setidaknya bisa diakomodir melalui optimalisasi *hiperlink* dari *e-government* pemerintah daerah tersebut ke *website* BPK jika tidak ingin didesiminasikan ke dalam *e-government* yang dimiliki.

Adapun jika menyangkut *technology* dan *user support*, untuk mengatasi hambatan langkanya SDM yang handal, maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Keberhasilan pelaksanaan *e-government* bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya.

5.2 Implikasi

Implikasi penelitian ini adalah pentingnya suatu lembaga yang mengatur dan menilai kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui *e-government*. Tentu saja ini juga akan berimplikasi pada perlunya dilakukan regulasi terhadap pengungkapan optimalisasi pemanfaatan *e-government*, baik bagi perusahaan provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini hanya merupakan awal dari penelitian eksploratif, yaitu hanya membandingkan tingkat pengungkapan informasi yang dimiliki dengan format dan kualitas berdasarkan komponen *content*, *timeliness*, *technology* dan *user support* antar kedua kelompok sampel yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk penelitian berikutnya diharapkan akan dianalisis determinan atau faktor penentu yang mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik melalui *e-government*.

Daftar Pustaka

- Almilia, Luciana Spica, 2009. *Analisa Komparasi Indeks Internet Financial Reporting pada Website Perusahaan Go Publik di Indonesia*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009.
- Almilia,, 2009. *Eksplorasi Pemanfaatan Technology dan User Support Pada Website Perusahaan Go Publik Di Indonesia*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009.
- Cheng, A. Lawrence, S and Coy, D., 2000. *Measuring the Quality of Corporate Financial Websites: A New Zealand Study*. Paper presented at the 12th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues-Beijing.
- Evans, J., and Patton, J., 1987. Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting. *Journal of Accounting Research* 25 (Supplement), 130–158.
- Fadzil, Faudziah Hanim, and Nyoto, Harryanto, 2011. Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. *World Review of Business Research Vol 1 No, 2 pp 51-70*.
- Giroux, G., and McLelland, A.J., 2003. Governance Structure and Accounting at Large Municipalities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22: 203-230..
- GASB (Governmental Accounting Standards Boards), 1999. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting. Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government*. Norwalk.
- Groff, JF, and Pitman, M.K, 2004. Municipal Financial Reporting on the World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on the Official Websites of the 100 largest US Municipalities. *Journal of Government Financial Management*, 53 (2): 20-30.
- Halim, Abdul, dan Abdullah, Syukriy, 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1 pp 53-64*.
- Ingram, R.W., and Dejong, D.V., 1987. The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practises. *Journal of Accounting and Public Policy*, 6: 245-270.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. *Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)*.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard and Oyelere, Peter, 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24: 101-121.
- Mannan, Siti Sofiyah Abdul, 2009. *e-Corporate Governance Disclosure dan Kinerja Perusahaan pada Periode Bearish: Studi Kasus di Pasar Modal Indonesia*. Tesis UGM.
- Moe, T.M., 1984. The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.

- Mussari, Riccardo and Steccolini, Ileana, 2006. Using the Internet for Communicating Performance Information. *Public Money and Management Journal*, Vol. 26 (3), 193-196.
- Oyelere, Peter, Laswad, Fauzi, and Fisher, Richard, 2003. Determinant of Internet Financial Reporting by New Zealand Companies. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 14: 1-39.
- Robbins, W.A. and Austin, K.R., 1986. Disclosure Quality in Governmental Financial Report: An Assessment of the Appropriateness of A Compound Measure. *Journal of Accounting Research*, 24 (2): 412-421.
- Sekaran, Uma, 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penebit Salemba Empat.
- Sosiawan, Edwi Arief, 2008. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia. <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id>.
- Styles, Alan K. and Tennyson, Mack, 2007. The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Spring. 19: 56-92.
- Supangkat, Suhono Harso, 2008. *CIO. Chief Information Officer. Peran Kepemimpinan Pengelola Informasi untuk Pertumbuhan Organisasi*. Penerbit ICT (The Indonesian ICT Institutes).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Verawaty, 2010. *Ketersediaan IFR (Internet Financial Reporting) melalui e-government sebagai Sarana Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Publik di Sumatera Selatan*. Penelitian DIPA Dikti Tahun 2010.
- Verawaty dan Merina, Citra Indah, 2011. *Aksesibilitas Informasi Publik Pemerintah Provinsi di Indonesia (Telaah Penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik)*. Penelitian DIPA Dikti Tahun 2011.
- Verawaty, 2012. The Availability of IFR (Internet Financial Reporting) through E-Government as Public Transparency, Participation, and Accountability Means In Indonesia. Proceedings of The 13th Malaysia-Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting (MICEMA), Palembang, Indonesia, pp. 562-579
- Verawaty, 2013. *The Accessibility Determinants of Internet Financial Reporting of Local Government: Further Evidence from Indonesia*. Paper presented to the scientific meeting of Fourth Asia Pasific Business Research Conference", Singapore <http://www.wbiworldconpro.com/pages/previous_confo/singapore-conference-2013>
- Wagenhofer, A., 2003. Economic Consequences of Internet Financial Reporting. *Schmalenbach Business Review*, 55 (4): 262-279.
- Zimmerman, J., 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*, 15: 107-144.